



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LKJiP)**

**TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN TAKKALALLA**

**Jl. Sangkuru No. 6 Kode Pos 90981**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2025 Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) tahun 2025 Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan juga sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance, serta sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi.

Besar harapan kami bahwa laporan kinerja instansi pemerintah (LKJiP) tahun 2025 kecamatan takkalalla kabupaten wajo dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi kinerja bagi pemerintah kabupaten wajo.

Peneki, 2025



**CAMAT TAKKALALLA,**

**ANDI SARIWANA, S.Sos., M.Si**

NIP. 197412312007012040

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi.....	1
1.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah .....	1
1.2 Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	3
1.3 Aspek Strategis serta Permasalahan Kantor Kecamatan Takkalalla .....	18
1.4 Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II Perencanaan Kerja</b> .....	<b>21</b>
2.1 Rencana Strategis .....	21
2.1.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .	21
2.1.2 Publikasi.....	22
2.2 Perjanjian Kinerja/PK Tahun 2025.....	23
2.2.1 Publikasi.....	37
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja</b> .....	<b>38</b>
3.1 Capaian Organisasi .....	38
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja.....	38
3.1.2 Perbandingan antara realisasi capaian tahun 2025 dengan tahun 2024	38
3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target renstra PD...	42
3.1.4 Perbandingan realisasi kerja tahun dengan standar nasional.....	43
3.1.5 Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan solusi.....	43
3.1.6 Perbandingan atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	44
3.1.7 Perbandingan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan.....	44
3.1.8 Tindak lanjut rekomendasi inspektorat daerah .....	49
3.2 Realisasi Anggaran.....	53
3.2.1 Realisasi anggaran .....	53
3.2.2 Rasio belanja terhadap sasaran perangkat daerah .....	60
3.2.3 Rasio belanja terhadap sasaran strategis RPD Kab.Wajo 2025 ....	66
<b>BAB IV Penutup</b> .....	<b>72</b>
4.1 Kesimpulan .....	72
4.2 Saran .....	72

## Lampiran

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 113 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Wajo No 146 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo.

##### 1.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan peraturan bupati wajo nomor 146 tahun 2019 kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan

##### 1.1.2. Sumber daya perangkat daerah

Sumber daya yang mempengaruhi kinerja organisasi antara lain jumlah pegawai lingkup Kantor Kecamatan Takkalalla adalah sebanyak 15 orang ( data desember 2025 ). Komposisi pegawai Kantor Kecamatan Takkalalla dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini

1. Jumlah pegawai lingkup Kantor Kecamatan Takkalalla berdasarkan status pegawai dan jenis kelamin

Tabel 1

No.	Pegawai	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	4	4	8
2	PPPK	-	2	2
3	PPPK PW	3	2	5
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>8</b>	<b>15</b>

2. Jumlah pegawai lingkup Kantor Kecamatan Takkalalla berdasarkan pangkat dan golongan

Tabel 2.

PANGKAT KEPEGAWAIAN	GOL./RUANG	UNIT KERJA KANTOR KECAMATAN TAKKALALLA							Total Jumlah
		Camat	Sekretariat	Seksi Tata Pem.	Seksi PMD	Seksi Trantib	Seksi Kessos	Seksi Ekbang	
Pembina Tk. I	IV/b	1	-	-	-	-	-	-	1
Pembina	IV/a	-	1	-	-	-	-	-	1
Penata Tk. I	III/d	-	-	-	1	1	1	-	3
Penata	III/c	-	-	1	-	-	-	1	2
Penata Muda Tk.I	III/b	-	-	-	-	-	1	-	1
Penata Muda	III/a	-	-	-	1	-	-	-	1
Pengatur Tk. I	II/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur	II/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengatur Muda	II/a	-	1	-	-	-	-	-	1
Juru Tk. I	I/d	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru Muda Tk. I	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-
Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-
Honorar Daerah	-	-	1	3	-	-	1	-	5
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian, Desember 2025

3. Jumlah pegawai lingkup Kantor Kecamatan Takkalalla berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan

Tabel 3

No.	Pendidikan	PEGAWAI				Total Jumlah
		PNS	CPNS	PPPK	Honorar	
1	Strata-3/S3	-	-	-	-	-
2	Strata-2/S2	2	-	-	-	2
3	Strata-1/S1	5	-	1	2	8

4	Diploma 4( D4)	-	-	-	-	-
5	Diploma 3 (D3)	-	-	-	-	-
6	SMA/Sederajat	1	-	1	3	5
7	SMP/Sederajat	-	-	-	-	-
8	SD/Sederajat	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>8</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>15</b>

Sumber Data : Subag. Umum dan Kepegawaian, Desember 2025

## 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

### a. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Dan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Serta Peraturan Bupati Wajo Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Disebutkan Bahwa Kedudukan Kecamatan Adalah Merupakan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Pelaksana Teknis Kewilayahan Yang Mempunyai Wilayah Kerja Tertentu Dan Dipimpin Oleh Camat Dan Berkedudukan Di Bawah Dan Bertanggung Jawab Kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah.

### b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa kedudukan kecamatan adalah merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Serta Peraturan Bupati

Wajo Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Disebutkan bahwa camat yang mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan serta membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan, dan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati agar tercipta kelancaran pelaksanaan tugas.

Camat melaksanakan tugas umum pemerintahan yang fungsinya meliputi :

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemereintahan Desa/Kelurahan.
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, struktur organisasi kecamatan Takkalalla adalah sebagai berikut :

- a. Camat;
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan, dengan membawahi 2 subbagian yaitu :

- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
- Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Perekonomian dan Pembangunan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Bupati Wajo Nomor 146 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo, maka tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi Kecamatan Takkalalla adalah sebagai berikut :

**a. Camat**

**1. Tugas Pokok**

Kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang mempunyai tugas memimpin kecamatan dalam membina, mengoordinasikan dan melaksanakan tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial, perekonomian dan pembangunan, dan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

**2. Fungsi**

- a. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayahnya;
- b. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta dalam wilayah kerjanya;
- d. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya;
- e. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas serta pelayanan administrasi Kecamatan.

**3. Rincian Tugas**

- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja

- perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta yang tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan sarana dan fasilitas umum, pemberdayaan masyarakat, serta perekonomian dan pembangunan;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerja kecamatan;
  - d. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia, serta dengan pemuka masyarakat mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan;
  - e. melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
  - f. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
  - g. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
  - h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan;
  - i. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan;
  - j. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
  - k. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- l. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di desa/kelurahan dan kecamatan;
- m. melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati;
- n. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**b. Sekretaris**

**1. Tugas Pokok**

Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Kecamatan.

**2. Fungsi**

- a. pembinaan serta pelaksanaan tugas dan administrasi kecamatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, keuangan, dokumentasi, hukum, data dan informasi serta hubungan antar lembaga dan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan evaluasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan kecamatan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Rincian Tugas**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat Kecamatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengelola administrasi perkantoran dan rumah tangga kecamatan;
- c. Mengelola administrasi keuangan;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian;
- e. Mengelola administrasi perlengkapan dan peralatan;
- f. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**1. Tugas Pokok**

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas membantu Sekretaris Kecamatan dalam menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan umum dan kepegawaian dalam lingkup Kecamatan.

## **2. Fungsi**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Rincian Tugas**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengelola dan melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol;
- c. Mengelola dan melaksanakan urusan kepegawaian;
- d. Mengelola dan melaksanakan urusan perlengkapan dan aset;
- e. Mengelola dan melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- f. Mengelola dan melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## **- Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

### **1. Tugas Pokok**

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian mempunyai tugas membantu

Sekretaris Kecamatan dalam menyiapkan bahan, mengelola dan melaksanakan urusan administrasi perencanaan dan Keuangan.

## **2. Fungsi**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **3. Rincian Tugas**

- a. Merencanakan sub bagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat dan ketentuan perundangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan sub bagian perencanaan dan keuangan;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Menyusun rencana anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung berupa rencana kerja anggaran dan perubahan RKA serta rancangan dokumen pelaksanaan anggaran sesuai dengan tugas dan tanggungjawab agar tercapai tujuan anggaran yang efisien dan efektif;
- e. Menyiapkan pelaksanaan penatausahaan keuangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi

keuangan sesuai dengan aturan yang berlaku agar tercapainya pelaksanaan anggaran yang efektif dan akuntabel;

- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan sub bagian perencanaan dan keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan berdasarkan peraturan yang berlaku.

**c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan**

**1. Tugas Pokok**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang tata pemerintahan.

**2. Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Rincian Tugas**

- a. Merencanakan kegiatan seksi tata pemerintahan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar secepatnya dapat diperbaiki;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Memfasilitasi kerjasama antar Desa/Kelurahan dan penyelesaian perselisihan antar Desa/Kelurahan;
- g. Memfasilitasi penyelenggaraan lomba Desa/Kelurahan tingkat Kecamatan.
- h. Memfasilitasi penataan Desa/Kelurahan dan penyusunan peraturan Desa;
- i. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan, inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
- j. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan perencanaan yang akan datang;
- l. Melaksanakan tugas lain yang dipintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan berdasarkan peraturan yang berlaku.

**d. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa**

**1. Tugas Pokok**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

**2. Fungsi**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Rincian Tugas**

- a. Merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat desa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
  - d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar secepatnya dapat diperbaiki;
  - e. Memfasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pemberdayaan desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
  - f. Melaksanakan dan memfasilitasi pemungutan atas pajak dan retribusi daerah di wilayah kerjanya;
  - g. Menyenggarakan pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat;
  - h. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM);
  - i. Mengevaluasi hasil kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
  - j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan perencanaan yang akan datang;
  - k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- e. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

#### **1. Tugas Pokok**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum.

## **2. Fungsi**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Rincian Tugas**

- a. Merencanakan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar secepatnya dapat diperbaiki;
- e. Menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, ideologi dan kesatuan bangsa, serta kemasyarakatan;
- f. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
- g. Menegakkan dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di kecamatan;
- h. Melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi dan perijinan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- i. Mengevaluasi hasil kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat dan desa dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;

- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan perencanaan yang akan datang;
- k. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan berdasarkan peraturan yang berlaku.

**f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial**

**1. Tugas Pokok**

Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesejahteraan sosial.

**2. Fungsi**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan sosial;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Rincian Tugas**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
- e. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;

- f. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku agar secepatnya dapat diperbaiki;
- g. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
- h. Mengordinasikan dan melaksanakan kegiatan di bidang pencegahan dan penanggulangan bencana alam, penanggulangan pengungsi dan pemecahan masalah-masalah sosial;
- i. Melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi dan perijinan di bidang kesejahteraan sosial;
- j. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan perencanaan yang akan datang;
- l. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan berdasarkan peraturan yang berlaku

**g. Kepala Seksi Perekonomian Dan Pembangunan**

**1. Tugas Pokok**

Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang kepala seksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat dalam bidang perekonomian dan pembangunan.

**2. Fungsi**

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan pembangunan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian dan pembangunan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Rincian Tugas**

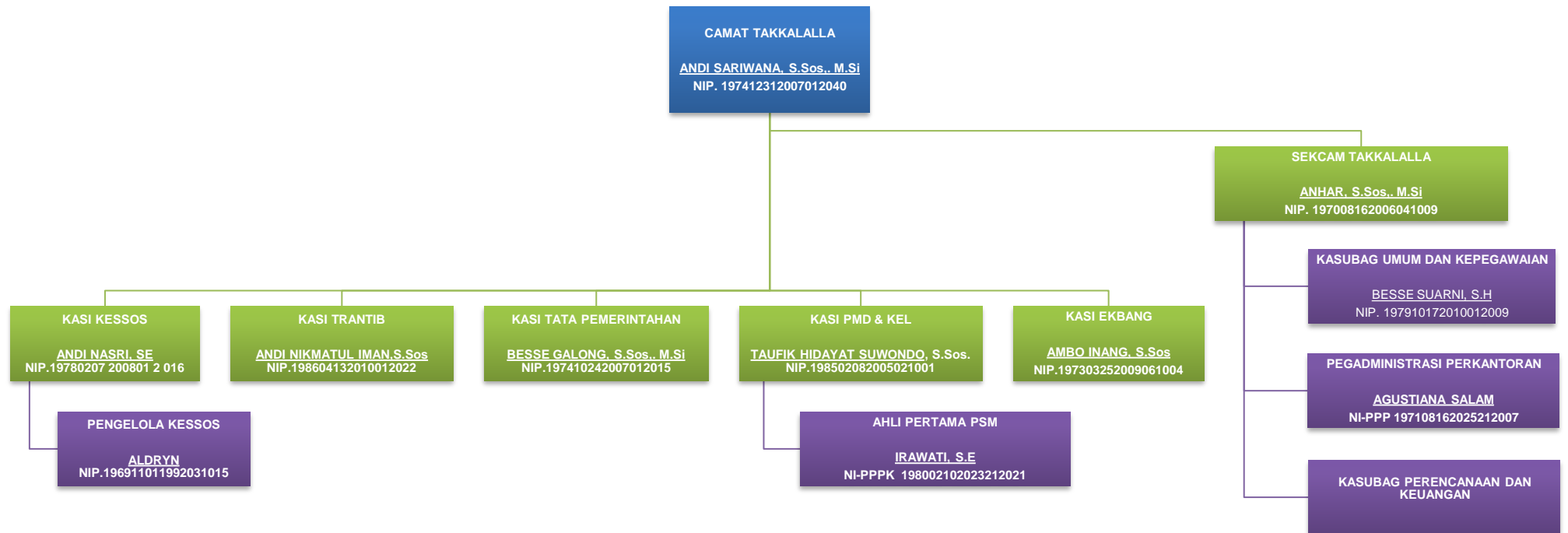
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha perkonomian di kecamatan;
- c. Membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan pengembangan perekonomian Desa/Kelurahan di kecamatan;
- f. Melaksanakan kegiatan di bidang pemberian rekomendasi dan perijinan di bidang perekonomian dan pembangunan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- h. Menghimpun hasil musrenbang tingkat desa/kelurahan dan merumuskan hasil Musrenbang kecamatan;
- i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan perencanaan yang akan datang;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tulisan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Jumlah personil Kantor Kec. Takkalalla yang menduduki Jabatan Struktural adalah :

- 1. Camat, Eselon III/a : 1 orang
- 2. Sekcam, Eselon III/b : 1 orang
- 3. Kepala Seksi, Eselon IV/a : 5 orang
- 4. Kepala Sub Bagian, Eselon IV/b : - orang

## Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo



### 1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Kantor Kecamatan Takkalalla

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan

- a. Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang mendukung pelayanan administrasi di kantor seperti komputer, laptop, printer, scan di kantor kecamatan takkalalla
- b. Adanya sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam teknologi informasi

Isu-Isu Strategis yang berdasar pada tugas dan fungsi pelayanan Kantor Kecamatan Takkalalla pada saat ini yaitu :

a. Bersifat internal :

- Kondisi sarana dan prasarana yang belum memadai dalam mendukung pelayanan dan peningkatan kinerja.
- Beberapa sarana dan prasarana yang memerlukan peningkatan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi aparat.
- Keterbatasan sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi baik secara kuantitas maupun kualitas.
- Masih belum memadainya kondisi aparatur dalam kompetensi atau kemampuan yang memerlukan adanya pendidikan dan pelatihan aparat secara intensif.
- Keterbatasan kewenangan dalam tugas dan fungsi kecamatan.
- Masih terbatasnya kewenangan dalam tugas dan fungsi kecamatan menjadikan kondisi kinerja kecamatan tidak optimal.
- Penerapan kebijakan reformasi birokrasi termasuk penerapan SPM dan SOP yang belum efektif.

b. Bersifat eksternal :

- Meningkatnya pertumbuhan penduduk seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas dan efisien. Oleh karena itu memerlukan kompetensi aparat yang lebih profesional, sistem dan prosedur kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan pelayanan serta dukungan sarana dan prasarana yang lebih memadai.
- Masih belum maksimalnya ketersediaan data yang akurat terhadap profil dan potensi wilayah kecamatan untuk program-program yang ada

dan pemenuhan informasi publik sehingga mempengaruhi kelancaran pengambilan kebijakan dan proses pelayanan terutama pelayanan administrasi perkantoran.

- Masih rendahnya partisipasi penduduk dalam kegiatan pembangunan seperti belum seluruh penduduk memiliki dokumen kependudukan sesuai peraturan berlaku saat ini yang berbasis NIK seperti KTP dan Kartu Keluarga. Selain itu tingkat realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dari masyarakat sebagai wajib pajak masih memerlukan peningkatan.
- Meningkatnya tingkat kerawanan terhadap keamanan dan ketertiban wilayah seperti peredaran narkoba, pencurian dan masalah sosial lainnya yang menimbulkan friksi di tengah masyarakat. Oleh karena itu perlunya sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat tentang keamanan dan ketertiban.
- Makin ketatnya persaingan antar pelaku ekonomi baik itu dari pemerintah antar negara, swasta dan lembaga lainnya dalam lingkup internasional seperti dengan adanya pemberlakuan MEA 2015 atau AFTA 2015, nasional dan lokal. Dengan memiliki daya saing yang rendah, tentunya akan mengalami ketertinggalan sehingga memerlukan terobosan serta kebijakan dalam menumbuhkan peningkatan daya saing ekonomi masyarakat.

#### **1.4 Sistematika laporan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### **A. Latar belakang**

1. Tugas dan fungsi organisasi utama OPD
2. Sumber daya manusia

###### **B. Struktur organisasi**

###### **C. Aspek strategis serta permasalahan utama**

1. Permasalahan internal organisasi
2. Permasalahan eksternal organisasi

##### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

###### **A. Rencana strrtategis**

1. Tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah
2. Publikasi

B. Perjanjian kinerja tahun 2025

1. Rekapitulai PK kepala perangkat daerah (jabatan tinggi pratama), pejabat administrator dan pengawas
2. Publikasi

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

A. Capaian kinerja organisasi

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja
2. Perbandingan antara realisasi capaian tahun 2025 dengan tahun 2023 dan tahun 2022
3. Perbandingan realisasi dan target renstra perangkat daerah
4. Perbandingan realisasi kerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan solusi
6. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis evaluasi program/kegiatan
8. Tindak lanjut rekomendasi inspektorat daerah

B. Realisasi anggaran

1. Realisasi anggaran
2. Rasio belanja terhadap sasaran perangkat daerah
3. Resio belanja terhadap sasaran RPJMD

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**LAMPIRAN**

A. Capaian penting lainnya

1. Capaian kinerja atas tugas tambahan
2. Capaian kinerja atas penyelesaian permasalahan/sengketa
3. Jumlah kebijakan

B. Keterlibatan seluruh pegawai

C. Inovasi

D. Penghargaan

E. Bukti dukung

## BAB II

### PERENCANAAN KERJA

#### 2.1. Rencana Strategis

Rencana strategi kecamatan takkalalla tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dicapai dalam kurung waktu lima tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wajo, rencana strategis kecamatan takkalalla menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tiap tahunnya.

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap kegiatan dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi kabupaten wajo. Adapun tujuan yang ingin dicapai kecamatan takkalalla yaitu : **terwujudnya pelayanan publik yang mudah, terjangkau, cepat dan tepat bagi seluruh masyarakat kecamatan takkalalla.** Untuk mewujudkan tujuan tersebut di atas ditetapkan sasaran pencapaian tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan dan pembangunan di kecamatan takkalalla
3. Terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat

##### 2.1.1 Tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama perangkat daerah

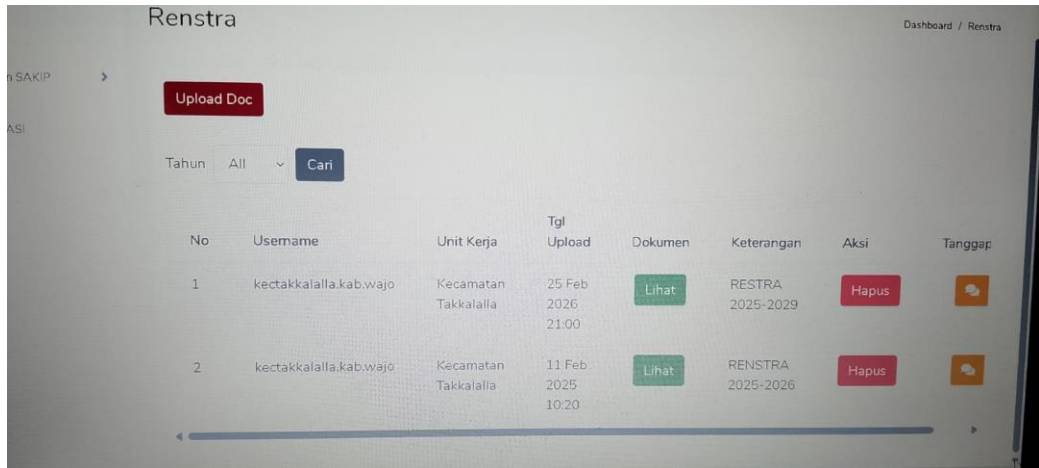
Berikut menyajikan informasi tentang tujuan, sasaran dan IKU perangkat daerah tahun 2025 sesuai renstra perangkat daerah pada tabel 2.1 sebagai berikut :

Tujuan sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target
Terwujudnya pelayanan publik yang mudah, terjangkau, cepat dan tepat bagi seluruh masyarakat / meningkatkan tata kelola perangkat daerah dan	Indeks pelayanan publik	65
	Nilai / predikat / kategori SAKIP perangkat daerah	65

<p>pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel</p>		
---	--	--

### 2.1.2 Publikasi

Rencana strategis (renstra) kecamatan takkalalla tahun 2019-2025 telah dipublikasikan pada website perangkat daerah atau pemerintah dalam hal ini pada aplikasi e-SAKIP, terlihat pada tangkapan layar di bawah :



## 2.2 Perjanjian Kinerja /PK Tahun 2025



**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO  
KECAMATAN TAKKALALLA  
Jl. Sangkuru No. 6 Peneki Kode Pos. 90981**

---

### **PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparandan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **DARMAWAN, S.T., M.T**

Jabatan : CAMAT TAKKALALLA

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ANDI ROSMAN, S.Sos., M.M**

Jabatan : BUPATI WAJO

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan bersedia dievaluasi secara berkala.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 17 Oktober 2025

**BUPATI WAJO**

**H. ANDI ROSMAN, S. Sos., M.M**

**CAMAT TAKKALALLA,**

**DARMAWAN, S.T., M.T**

**Pangkat : Pembina Tingkat I**

**NIP : 197305042005021001**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KECAMATAN TAKKALALLA**

A. Lampiran I

<b>No.</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tar get</b>
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai/Predikat/Kategori SAKIP Perangkat Daerah	64
		Indeks Pelayanan Publik	64

Sengkang, 17 Oktober 2025

**BUPATI WAJO**

**CAMAT TAKKALALLA,**

**H. ANDI ROSMAN, S. Sos., M.M**

**DARMAWAN, S.T., M.T**

**Pangkat : Pembina Tingkat I**

**NIP : 197305042005021001**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**  
**KECAMATAN TAKKALALLA**

B. Lampiran II

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata capaian output kegiatan perangkat daerah	100%
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase capaian kinerja pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.206.588.064,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 126.610.100,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 438.992.000,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 16.875.000,00	APBD
		<b>Rp. 8.789.065.164,00</b>	

**BUPATI WAJO**

**H. ANDI ROSMAN, S. Sos., M.M**

Sengkang, 17 Oktober 2025  
**CAMAT TAKKALALLA,**

**DARMAWAN, S.T., M.T**  
**Pangkat : Pembina Tingkat I**  
**NIP : 197305042005021001**

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

### KECAMATAN TAKKALALLA

#### C. Lampiran III

No.	Indikator Kinerja Lainnya	Target
(1)	(2)	(3)
1	Persentase pencapaian Program Strategis Nasional	-
2	Persentase pencapaian 8 (delapan) Program Wajo Maradeka	100%
3	Persentase pemenuhan indikator MCSP KPK	-
4	Persentase kemajuan kegiatan (fisik) perangkat daerah	100%
5	Persentase penyerapan anggaran	100%
6	Persentase Temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (termasuk temuan selama bertahun-tahun tidak selesai) sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah yang terlambat atau belum ditindaklanjuti sesuai rekomendasi dan masih relevan sampai tahun 2025	0%
7	Persentase Pelaporan LHKPN secara lengkap dan tepat waktu	100%
8	Persentase Pemenuhan Target PAD pada perangkat daerah atau PBB pada Kecamatan Tahun 2025	100%
9	Persentase Realisasi DAK dan DAU SG Tahun 2025	-
10	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	1
11	Persentase Laporan pengaduan/aspirasi masyarakat sesuai kewenangan perangkat daerah yang diselesaikan pada tingkat perangkat daerah	100%
12	Persentase Perintah atau arahan Bupati/Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah baik lisan maupun tertulis yang terlambat atau tidak diselesaikan dengan baik oleh perangkat daerah sepanjang tahun 2025	0%
13	Predikat Penilaian Kebersihan Kantor Perangkat Daerah	Baik
14	Jumlah Penghargaan yang diterima oleh perangkat daerah dan/atau pemerintah daerah atas kontribusi perangkat daerah Tahun 2025	0 penghargaan

15	Jumlah bantuan Pusat (anggaran, barang dan/atau jasa) yang diterima oleh pemerintah daerah atas kontribusi perangkat daerah Tahun 2025	-
----	--	---

**BUPATI WAJO**

**H. ANDI ROSMAN, S. Sos., M.M**

Sengkang, 17 Oktober 2025  
**CAMAT TAKKALALLA,**

**DARMAWAN, S.T., M.T**  
**Pangkat : Pembina Tingkat I**  
**NIP : 197305042005021001**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
SEKRETARIS KANTOR KECAMATAN TAKKALALLA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket
3	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan
4	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit
5	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36 laporan
6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	50 laporan
7	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan
8	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit
9	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit
10	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	1 dokumen
11	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta	36 unit
12	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen
13	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP OPD yang disusun sesuai ketentuan	1 laporan
14	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	104 orang/bulan
15	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
16	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 laporan

<b>No</b>	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 2.000.000,-
2.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 500.000,-
3.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 26.755.000,-
4.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 45.501.300,-

5.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp.	11.561.500,-
6.	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp.	22.350.000,-
7.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp.	2.000.000,-
8.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp.	26.657.100,-
9.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp.	6.000.000,-
10.	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Rp.	600.000,-
11.	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Rp.	115.096.600,-
12.	Penyusunan dokumen perencanaan daerah	Rp.	2.001.500,-
13.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp.	240.000,-
14.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp.	8.059.941.664,-
15.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp.	240.000,-
16.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Rp.	240.000,-
	<b>Jumlah</b>	Rp.	<u>8.321.684.664,-</u>

Sengkang, 17 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA**  
**CAMAT TAKKALALLA**

**PIHAK PERTAMA**  
**SEKRETARIS CAMAT TAKKALALLA**

**DARMAWAN, S.T., M.T.**  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I  
NIP. 197305042005021001

**ANDI M. ADNAN SULTAN. S.Sos., M.Si.**  
Pangkat/Gol : Pembina/ IV/a  
NIP. 197902162010011008

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
KANTOR KECAMATAN TAKKALALLA**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 paket
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket
3	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan
4	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	3 unit
5	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36 laporan
6	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	50 laporan
7	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 laporan
8	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit
9	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit
10	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	1 dokumen
11	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dipelihara dengan melibatkan pihak swasta	36 unit

No	Sasaran Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 2.000.000,-
2.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 500.000,-
3.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 26.755.000,-
4.	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 45.501.300,-
5.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 11.561.500,-
6.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 22.350.000,-
7.	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 2.000.000,-
8.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Rp. 26.657.100,-
9.	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Rp. 6.000.000,-
10.	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Rp. 600.000,-
11.	Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Rp.115.096.600,-
	<b>Jumlah</b>	Rp.259.021.500,-

Sengkang, 17 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA**  
**SEKRETARIS CAMAT TAKKALALLA**

**ANDI M. ADNAN SULTAN. S.Sos., M.Si.**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SUB BAGIAN UMUM**  
**DAN KEPEGAWAIAN**

.....

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN  
KANTOR KECAMATAN TAKKALALLA**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 dokumen
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP OPD yang disusun sesuai ketentuan	1 laporan
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	104 orang/bulan
4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
5	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Penyusunan dokumen perencanaan daerah	Rp. 2.001.500,-
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp. 240.000,-
3.	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Rp. 8.059.941.664,-
4.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Rp. 240.000,-
5.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Rp. 240.000,-
	<b>Jumlah</b>	Rp. 8.062.663.164,-

Sengkang, 17 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA**  
**SEKRETARIS CAMAT TAKKALALLA**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SUB BAGIAN**  
**PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

**ANDI M. ADNAN SULTAN. S.Sos., M.Si.**

Pangkat/Gol : Pembina/ IV/a

NIP. 197902162010011008

.....

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN  
KANTOR KECAMATAN TAKKALALLA**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah dokumen peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	1 dokumen
2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	12 laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 1.000.000,-
2.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Rp.10.033.500,-
	<b>Jumlah</b>	Rp.11.033.500,-

Sengkang, 17 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA  
CAMAT TAKKALALLA**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI TATA  
PEMERINTAHAN**

**DARMAWAN, S.T., M.T.**  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I / IV/b  
NIP. 197305042005021001

**NIKMA, S.Sos.**  
Pangkat/Gol : Penata / III/c  
NIP. 197010092009061005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  
KANTOR KECAMATAN TAKKALALLA**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan	13 laporan
2	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangunan	2 unit

No	Sasaran Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rp. 12.000.000,-
2.	Pembangunan sarana dan prasana kelurahan	<u>Rp.412.252.000,-</u>
	<b>Jumlah</b>	Rp.424.252.000,-

Sengkang, 17 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA  
CAMAT TAKKALALLA**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**

**DARMAWAN, S.T., M.T.**  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I  
NIP. 197305042005021001

**TAUFIK HIDAYAT SUWONDO, S.Sos**  
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III/d  
NIP. 198502082005021001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  
KANTOR KECAMATAN TAKKALALLA**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	1 dokumen
2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah laporan pelaksanaan non perizinan pada urusan pemerintahan	1 laporan
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	11 lembaga kemasyarakatan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Rp. 240.000,-
2.	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Rp. 240.000,-
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Rp. 14.740.000,-
	<b>Jumlah</b>	Rp. 15.220.000,-

Sengkang, 17 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA  
CAMAT TAKKALALLA**

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN**

**DARMAWAN, S.T., M.T.**  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I  
NIP. 197305042005021001

**AMBO INANG, S.Sos**  
Pangkat/Gol : Penata / III/c  
NIP. 197303252009061004

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL  
KANTOR KECAMATAN TAKKALALLA**

<b>No</b>	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Indikator Sub Kegiatan</b>	<b>Target</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	4 laporan

<b>No</b>	<b>Sasaran Sub Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	<u>Rp. 5.875.000,-</u>
	<b>Jumlah</b>	Rp. 5.875.000,-

Sengkang, 17 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA**  
**CAMAT TAKKALALLA**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN**  
**SOSIAL**

**DARMAWAN, S.T., M.T.**  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I  
NIP. 197305042005021001

**ANDI NASRI, SE.**  
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III/d  
NIP. 197802072008012016

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
KANTOR KECAMATAN TAKKALALLA**

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Jumlah laporan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik Indonesia	1 laporan
2	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan

No	Sasaran Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Koordinasi/sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Rp. 5.000.000,-
2.	Sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Rp. 6.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	Rp. 11.000.000,-

Sengkang, 17 Oktober 2025

**PIHAK KEDUA  
CAMAT TAKKALALLA**

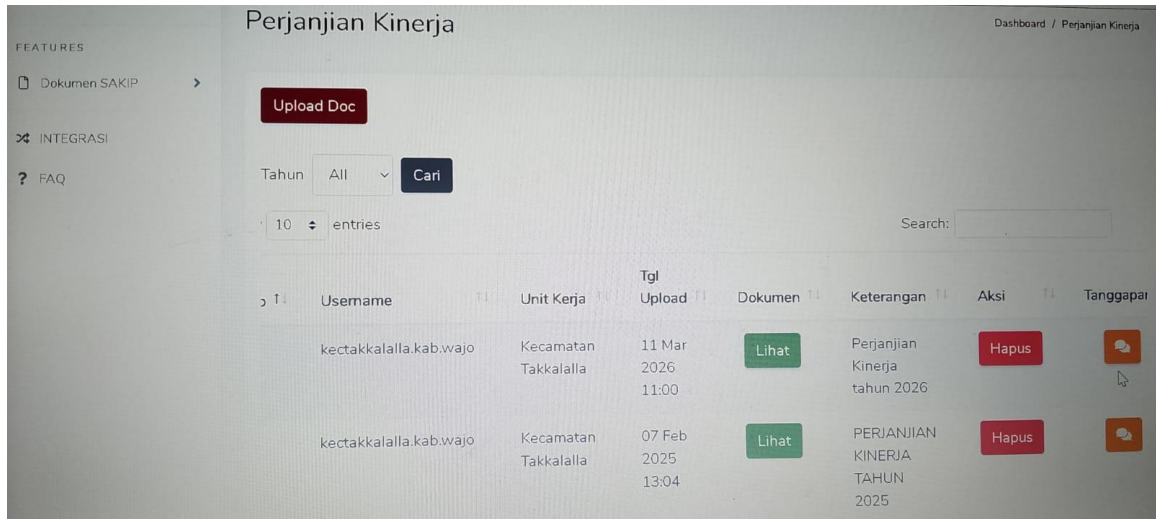
**PIHAK PERTAMA  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN  
KETERTIBAN UMUM**

**DARMAWAN, S.T., M.T.**  
Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I  
NIP. 197305042005021001

**ANDI NIKMATUL IMAN, S.Sos.**  
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I / III/d  
NIP. 198704132010012022

## 2.2.1 Publikasi

Rekapitulasi PK Perangkat Daerah yang memuat sasaran strategis, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target serta penanggungjawab kinerja telah dipublikasikan pada website perangkat daerah yakni pada aplikasi e-Sakip, tergambar pada foto berikut :



Dashboard / Perjanjian Kinerja

FEATURES

- Dokumen SAKIP
- INTEGRASI
- FAQ

Upload Doc

Tahun: All Cari

10 entries

Search:

Username	Unit Kerja	Tgl Upload	Dokumen	Keterangan	Aksi	Tanggapan
kectakkalalla.kab.wajo	Kecamatan Takkalalla	11 Mar 2026 11:00	Lihat	Perjanjian Kinerja tahun 2026	Hapus	
kectakkalalla.kab.wajo	Kecamatan Takkalalla	07 Feb 2025 13:04	Lihat	PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	Hapus	

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Organisasi

Setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

##### 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja

Pada tabel ii menyajikan informasi perbandingan antara target PK setiap tingkatan (level jabatan) dengan realisasi

**Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Tahun 2025	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Indeks Pelayanan Publik	64	58,25	92%	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	64	61,16	91%	

##### 3.1.2 Perbandingan antara realisasi capaian tahun 2025 dengan tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi		Ket
			Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	5	6	7
	Mewujudkan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		64	
		Indeks Pelayanan Publik			64
	Kecamatan		8.715.112.040	8.052.715.378	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rata-Rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (%)	8.488.968.040	7.900.254.815	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan dan Penganggaran (%)	-	2.051.478	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	-	1.878.498	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	-	172.980	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)</b>	<b>8.214.746.140</b>	<b>7.788.056.249</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	8.214.746.140	7.787.710.788	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	-	172.980	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	-	172.481	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>persentase Ketersediaan Adminsitasi Umum Perangkat daerah (%)</b>	<b>85.515.000</b>	<b>25.385.996</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	-	965.996	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	-	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.000.000	-	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	79.515.000	24.420.000	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase BMD-PD Penunjang Urusan yang terpenuhi (%)</b>	<b>50.410.800</b>	<b>18.500.000</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	50.410.800	-	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan (Unit)	-	18.500.000	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase jasa Penunjang Urusan yang terpenuhi (%)</b>	<b>118.605.100</b>	<b>33.902.823</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	13.531.500	11.552.823	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	18.500.000	22.350.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.000.000	-	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	85.573.600	-	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan yang terpelihara (%)</b>	<b>19.691.000</b>	<b>31.788.270</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	19.691.000	25.788.800	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	-	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	-	5.999.470	
	<b>Penata Organisasi</b>	<b>Jumlah Dokumen Kelembagaan Organisasi yang tersedia (Dokumen)</b>	-	<b>569.999</b>	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan (Dokumen)	-	569.999	
	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)</b>	<b>1.196.000</b>	<b>115.210.677</b>	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dikoordinasikan (%)</b>	-	<b>875.000</b>	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	-	875.000	
	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>		-	<b>104.300.000</b>	
	Peaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta (Unit)	-	104.300.000	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Urusan yang di Limpahkan Kecamatan (%)</b>	<b>1.196.000</b>	<b>10.035.677</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	-	172.980	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	-	172.980	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	1.196.000	9.689.717	
	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase Capaian Kinerja pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (%)</b>	<b>220.148.000</b>	<b>25.685.002</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Desa yang di Koordinasikan (%)</b>	<b>20.148.000</b>	<b>25.685.002</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di DEsa (Lembaga Kemasyarakatan)	15.000.000	14.205.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	5.148.000	11.480.002	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>Persentase Pemberdayaan Kelurahan yang di Koordinasikan (%)</b>	<b>200.000.000</b>	-	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	200.000.000	-	
	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase capaian kinerja pelaksanaan Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum (%)</b>	<b>4.800.000</b>	<b>11.564.884</b>	

	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase pelaksanaan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dikoordinasikan (%)</b>	<b>4.800.000</b>	<b>6.749.887</b>	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	4.800.000	875.000	
	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	-	5.874.887	
	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (%)</b>	<b>-</b>	<b>4.814.997</b>	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia (Laporan)	-	4.814.997	

### 3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target renstra perangkat daerah

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2025	Target Renstra Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Indeks Pelayanan Publik	64	65	58,25	
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	64	65	61,16	

### 3.1.4 Perbandingan realisasi kerja tahun ini dengan standar nasional

Pada tabel dibawah menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Target PK Tahun 2025	Data Standar Nasional (jika ada)	Realisasi Tahun 2025	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	Nilai Sakip Perangkat Daerah	64	-	58,25	
		Indeks Pelayanan Publik	64	-	61,16	

### 3.1.5 Analisis penyebab peningkatan / penurunan kinerja dan solusi

Pada tabel berikut menyajikan informasi analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dan akan di lakukan, sebagai berikut :

No	Indikator	Capaian (%)	Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja	Upaya yang Telah Dilakukan	Solusi
1	2	3	4	5	6
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	92%	Program Kerja hanya mengejar serapan anggaran dan penyelesaian kegiatan fisik, bukan pada hasil akhir yang di rasakan masyarakat, serta kurangnya monitoring dan evaluasi berkala atas pencapaian kinerja yang menyebabkan masalah tidak terdeteksi lebih awal	Dalam Penyusunan Anggaran telah dioptimalkan penyesuaiannya antara anggaran dengan kebutuhan	Untuk Target Kinerja Kegiatan yang belum tercapai, kedepannya akan lebih dioptimalkan baik itu Koordinasi dengan Penanggung Jawab kegiatan maupun penyusunan Anggaran yang bisa mempengaruhi terlaksananya kegiatan
2	Indeks Pelayanan Publik	91%	Kurang kompeten dalam mengoperasikan teknologi, kurangnya dukungan manajerial untuk melakukan inovasi atau revitalisasi unit layanan, akses internet yang terbatas, serta rendahnya literasi digital masyarakat	Implementasi sistem informasi yang mempermudah akses masyarakat dan mempercepat waktu pelayanan masyarakat	Peningkatan kompetensi aparatur dan perubahan pola pikir ( mindset) menuju pelayanan yang adaptif dan inovatif

### 3.1.6 Perbandingan atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pada tabel berikut menyajikan informasi analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya misalnya info besaran efisiensi yang terjadi dapat di kuantifikasikan, jenis efisiensi yang telah dilakukan atau upaya yang telah dilakukan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Capaian (%)	Jumlah Anggaran			Analisis Efisiensi Sumber Daya	Ket
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Berkinerja Tinggi dan Akuntabel	91,62%	8.789.065.164,00	8.052.715.378,00	91,62%		

### 3.1.7 Analisis evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Indikator	Capaian (%)	Terkait Pencapaian Sasaran			Tidak Terkait Pencapaian Sasaran			Ket
				Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	96,27 %	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
									Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
								Administrasi Umum Perangkat Daerah		
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
									Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
									Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
								Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

									Pengadaa n Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
								Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		
									Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	
									Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	
									Penyediaa n Jasa Peralatan dan Perlengka pan Kantor	
									Penyediaa n Jasa Pelayanan Umum Kantor	
								Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah		
									Penyediaa n Jasa Pemelihar aan, Biaya Pemelihar aan, dan Pajak Kendaraa n Peroranga n Dinas atau Kendaraa n Dinas Jabatan	
									Pemelihar aan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

								Penataan Organisasi		
									Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pelayanan dan Pembangunan di Kecamatan Takkalalla	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	91,00 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
								Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
									Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		

						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				
						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				
3			5,85 %	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>			
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
					Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan					
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				

4	Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Capaian Kinerja Pelaksanaan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	68,53 %	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		
					Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundangan-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		
								Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		

### 3.1.8 Tindak lanjut rekomendasi inspektorat daerah

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Takkalalla Tahun Anggaran 2024 Nomor : 700.01.2.1/43.37/E.SAKIP/2025/IV/Itda tanggal 29 April 2025 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Wajo. Dengan tindak lanjut sebagai berikut :

No	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Ket
1	Dokumen perencanaan kinerja agar lebih maksimal memublikasikan tepat waktu dalam esr.menpan.go.id, yakni seluruh dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan pokok maupun perubahan	Memaksimalkan dan memublikasikan dokumen perencanaan tepat waktu dalam esr.menpan.go	
2	Melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja yang dimiliki dengan melihat adanya kinerja yang sudah disusun pada cascading kinerja yang dimiliki untuk melihat adanya potensi croscutting kinerja sesuai tugas dan fungsi dari PD lain yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja	Telah melakukan identifikasi dan pemetaan pada cascading kinerja	
3	Agar menyusun dokumen SOP pengumpulan data kinerja dan pengukuran data kinerja dan diupload di esr.menpan.go.id	Menyusun dokumen SOP di esr.menpan.go.id	
4	Menyusun laporan monitoring evaluasi triwulan I,II,III dan IV, sesuai dengan form E.81 Permendagri Nomor 86 tahun 2017	Menyusun laporan monitoring evaluasi sesuai Permendagri Nomor 86 tahun 2017	
5	Agar memberikan penjelasan dalam laporan atas sumber data dan cara perhitungan indikator kinerja	Memberikan penjelasan atas sumber data dan cara perhitungan indikator kinerja	

6	<p>Agar menyajikan tabel 2.1 Renstra PD, tabel 2.2 Rekapitulasi PK, tabel 3.1 perbandingan antara target dan realisasi kinerja, tabel 3.1.1 perbandingan antara target dan realisasi kinerja sasaran strategis, tabel 3.2 perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2024 dengan 2023 dan tahun 2022, tabel 3.3 perbandingan antara realisasi kinerja dengan target renstra, tabel 3.4 perbandingan antara realisasi kinerja dengan standar nasional, tabel 3.5 analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja dan solusi, tabel 3.6 analisis efisiensi penggunaan sumber daya, tabel 3.7 analisis evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan, tabel 3.9 rasio belanja terhadap sasaran strategis PD dalam laporan kinerja sesuai format lampiran 1 surat sekretaris daerah nomor 000.8.6.3/11/Setda tanggal 3 januari 2025 dan petunjuk teknis dalam permenpan RB No. 53 tahun 2014</p>	<p>Menyajikan semua tabel sesuai surat sekretaris daerah nomor surat sekretaris daerah nomor 000.8.6.3/11/Setda tanggal 3 januari 2025 dan petunjuk teknis dalam permenpan RB No. 53 tahun 2014</p>	
7	<p>Agar menindaklanjuti seluruh temuan hasil evaluasi</p>	<p>Menindaklanjuti seluruh temuan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja</p>	

	akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya dengan melampirkan bukti dukung dan diupload di esr.menpan.go.id	
--	---	--

Peneki, 2025



KAMAT TAKKALALLA,

**ANDI SARIWANA, S.sos., M.Si**

NIP. 197412312007012040

## 3.2 Realisasi Anggaran

### 3.2.1 Realisasi anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub kegiatan Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025															Ket
		Jumlah Pagu							Realisasi							Capaian (%)	
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Belanja	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Modal	Total Realisasi		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	<b>Kecamatan</b>	<b>8.059.941.664</b>	<b>291.737.900</b>	-	-	-	<b>437.385.600</b>	<b>8.789.065.164</b>	<b>7.787.710.788</b>	<b>246.504.590</b>	-	-	-	<b>18.500.000</b>	<b>8.052.715.378</b>	<b>91,62 %</b>	
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.059.941.664</b>	<b>101.362.800</b>	-	-	-	<b>45.283.600</b>	<b>8.206.588.064</b>	<b>7.787.710.788</b>	<b>94.044.027</b>	-	-	-	<b>18.500.000</b>	<b>7.900.254.815</b>	<b>96,27 %</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	-	<b>2.241.500</b>	-	-	-	-	<b>2.241.500</b>	-	<b>2.051.478</b>	-	-	-	-	<b>2.051.478</b>	<b>91,52 %</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2.001.500	-	-	-	-	2.001.500	-	1.878.498	-	-	-	-	1.878.498	93,85 %	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	240.000	-	-	-	-	240.000	-	172.980	-	-	-	-	172.980	72,08 %	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.059.941.664</b>	<b>480.000</b>	-	-	-	-	<b>8.060.421.664</b>	<b>7.787.710.788</b>	<b>345.461</b>	-	-	-	-	<b>7.788.056.249</b>	<b>96,62 %</b>	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.059.941.664	-	-	-	-	-	8.059.941.664	7.787.710.788	-	-	-	-	7.787.710.788	96,62 %	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	240.000	-	-	-	-	240.000	-	172.980	-	-	-	172.980	72,08 %	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	240.000	-	-	-	-	240.000	-	172.481	-	-	-	172.481	71,87 %	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	-	<b>29.255.000</b>	-	-	-	-	<b>29.255.000</b>	-	<b>25.385.996</b>	-	-	-	<b>25.385.996</b>	86,77 %	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	965.996	-	-	-	965.996	48,30 %	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	-	500.000	-	-	-	-	500.000	-	-	-	-	-	-	0,00%	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0 !	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	26.755.000	-	-	-	-	26.755.000	-	24.420.000	-	-	-	24.420.000	91,27 %	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	-	<b>217.700</b>	-	-	-	<b>45.283.600</b>	<b>45.501.300</b>	-	-	-	-	<b>18.500.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>40,66 %</b>	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	217.700	-	-	-	45.283.600	45.501.300	-	-	-	-	-	18.500.000	18.500.000	40,66%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	<b>35.911.500</b>	-	-	-	-	<b>35.911.500</b>	-	<b>33.902.823</b>	-	-	-	-	<b>33.902.823</b>	<b>94,41%</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	11.561.500	-	-	-	-	11.561.500	-	11.552.823	-	-	-	-	11.552.823	99,92%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	22.350.000	-	-	-	-	22.350.000	-	22.350.000	-	-	-	-	22.350.000	100,00%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	-	<b>32.657.100</b>	-	-	-	-	<b>32.657.100</b>	-	<b>31.788.270</b>	-	-	-	-	<b>31.788.270</b>	<b>97,34%</b>

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	26.657.100	-	-	-	-	26.657.100	-	25.788.800	-	-	-	-	25.788.800	96,74 %	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0 !	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	5.999.470	-	-	-	-	5.999.470	99,99 %	
	<b>Penata Organisasi</b>	-	<b>600.000</b>	-	-	-	-	<b>600.000</b>	-	<b>569.999</b>	-	-	-	-	<b>569.999</b>	<b>95,00 %</b>	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	600.000	-	-	-	-	600.000	-	569.999	-	-	-	-	569.999	95,00 %	
2	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	-	<b>126.610.100</b>	-	-	-	-	<b>126.610.100</b>	-	<b>115.210.677</b>	-	-	-	-	<b>115.210.677</b>	<b>91,00 %</b>	
	<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	-	<b>1.000.000</b>	-	-	-	-	<b>1.000.000</b>	-	<b>875.000</b>	-	-	-	-	<b>875.000</b>	<b>87,50 %</b>	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	1.000.000	-	-	-	-	1.000.000	-	875.000	-	-	-	-	875.000	87,50 %	
	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	-	<b>115.096.600</b>	-	-	-	-	<b>115.096.600</b>	-	<b>104.300.000</b>	-	-	-	-	<b>104.300.000</b>	<b>90,62 %</b>	
	Peaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	-	115.096.600	-	-	-	-	115.096.600	-	104.300.000	-	-	-	-	104.300.000	90,62 %	
	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	-	<b>10.513.500</b>	-	-	-	-	<b>10.513.500</b>	-	<b>10.035.677</b>	-	-	-	-	<b>10.035.677</b>	<b>95,46 %</b>	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	-	240.000	-	-	-	-	240.000	-	172.980	-	-	-	-	172.980	72,08 %	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	-	240.000	-	-	-	-	240.000	-	172.980	-	-	-	-	172.980	72,08 %	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	-	10.033.500	-	-	-	-	10.033.500	-	9.689.717	-	-	-	-	9.689.717	96,57 %	

3	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	-	<b>46.890.000</b>	-	-	-	<b>392.102.000</b>	<b>438.992.000</b>	-	<b>25.685.002</b>	-	-	-	-	<b>25.685.002</b>	<b>5,85%</b>	
	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	-	<b>26.740.000</b>	-	-	-	-	<b>26.740.000</b>	-	<b>25.685.002</b>	-	-	-	-	<b>25.685.002</b>	<b>96,05%</b>	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	-	14.740.000	-	-	-	-	14.740.000	-	14.205.000	-	-	-	-	14.205.000	96,37%	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	12.000.000	-	-	-	-	12.000.000	-	11.480.002	-	-	-	-	11.480.002	95,67%	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	-	<b>20.150.000</b>	-	-	-	<b>392.102.000</b>	<b>412.252.000</b>	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	20.150.000	-	-	-	392.102.000	412.252.000	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	
4	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	-	<b>16.875.000</b>	-	-	-	-	<b>16.875.000</b>	-	<b>11.564.884</b>	-	-	-	-	<b>11.564.884</b>	<b>68,53%</b>	
	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	-	<b>11.875.000</b>	-	-	-	-	<b>11.875.000</b>	-	<b>6.749.887</b>	-	-	-	-	<b>6.749.887</b>	<b>56,84%</b>	

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	-	6.000.000	-	-	-	-	-	6.000.000	-	875.000	-	-	-	-	875.000	14,58 %
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	-	5.875.000	-	-	-	-	-	5.875.000	-	5.874.887	-	-	-	-	5.874.887	100,00 %
<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	-	<b>5.000.000</b>	-	-	-	-	-	<b>5.000.000</b>	-	<b>4.814.997</b>	-	-	-	-	<b>4.814.997</b>	<b>96,30 %</b>
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	5.000.000	-	-	-	-	-	5.000.000	-	4.814.997	-	-	-	-	4.814.997	96,30 %

### 3.2.2 Rasio belanja terhadap sasaran perangkat daerah

Pada tabel berikut menyajikan informasi belanja yang digunakan untuk mewujudkan sasaran strategis perangkat daerah dan informasi belanja yang tidak terkait sasaran sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Program/Kegiatan/Subkegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/Kegiatan/Subkegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Ket
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Kecamatan		8.789.065.164	8.052.715.378				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.206.588.064	7.900.254.815				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.241.500	2.051.478	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.060.421.664	7.788.056.249	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.001.500	1.878.498	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.059.941.664	7.787.710.788	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	240.000	172.980	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	240.000	172.481	

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	240.000	172.980				
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>29.255.000</b>	<b>25.385.996</b>	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	965.996	
					Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	500.000	-	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.755.000	24.420.000	

					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45.501.300</b>	<b>18.500.000</b>	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.501.300	18.500.000	
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.911.500</b>	<b>33.902.823</b>	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.561.500	11.552.823	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.350.000	22.350.000	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	-	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>32.657.100</b>	<b>31.788.270</b>	

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.657.100	25.788.800	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	5.999.470	
					<b>Penata Organisasi</b>	<b>600.000</b>	<b>569.999</b>	
					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	600.000	569.999	
2	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pelayanan dan Pembangunan di Kecamatan Takkalalla</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>126.610.100</b>	<b>115.210.677</b>				
					<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.000.000</b>	<b>875.000</b>	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.000.000	875.000	
		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>115.096.600</b>	<b>104.300.000</b>				

		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	115.096.600	104.300.000				
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>10.513.500</b>	<b>10.035.677</b>				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	240.000	172.980				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	240.000	172.980				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.033.500	9.689.717				
<b>3</b>		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>438.992.000</b>	<b>25.685.002</b>				
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>26.740.000</b>	<b>25.685.002</b>				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.740.000	14.205.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.000.000	11.480.002	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>412.252.000</b>	-				

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	412.252.000	-				
4	<b>Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>16.875.000</b>	<b>11.564.884</b>				
		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.814.997</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>11.875.000</b>	<b>6.749.887</b>	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000	4.814.997	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000	875.000	
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.875.000	5.874.887	

### 3.2.3 Rasio belanja terhadap sasaran strategis RPD Kabupaten Wajo tahun 2025

Pada tabel berikut menyajikan informasi belanja terhadap sasaran strategis RPD tahun 2025-2026 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis RPD Kabupaten Wajo tahun 2025-2026	Program/Kegiatan/Subkegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Program/Kegiatan/Subkegiatan Yang Terkait Langsung dengan Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Anggaran Tahun 2025		Ket
			Jumlah Pagu	Realisasi		Jumlah Pagu	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Kecamatan</b>		<b>8.789.065.164</b>	<b>8.052.715.378</b>				
<b>1</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>8.206.588.064</b>	<b>7.900.254.815</b>				
		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>2.241.500</b>	<b>2.051.478</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>8.060.421.664</b>	<b>7.788.056.249</b>	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.001.500	1.878.498	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.059.941.664	7.787.710.788	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	240.000	172.980	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	240.000	172.481	

		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	-	-				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	240.000	172.980				
					<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	-	-	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	
					<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>29.255.000</b>	<b>25.385.996</b>	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	965.996	
					Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	500.000	-	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.755.000	24.420.000	

					<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>45.501.300</b>	<b>18.500.000</b>	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	45.501.300	18.500.000	
					<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>35.911.500</b>	<b>33.902.823</b>	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.561.500	11.552.823	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.350.000	22.350.000	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.000.000	-	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	
					<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>32.657.100</b>	<b>31.788.270</b>	

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.657.100	25.788.800	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6.000.000	5.999.470	
					<b>Penata Organisasi</b>	<b>600.000</b>	<b>569.999</b>	
					Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	600.000	569.999	
2	<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Pelayanan dan Pembangunan di Kecamatan Takkalalla</b>	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b>	<b>126.610.100</b>	<b>115.210.677</b>				
					<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>1.000.000</b>	<b>875.000</b>	
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.000.000	875.000	
		<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>115.096.600</b>	<b>104.300.000</b>				

		Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	115.096.600	104.300.000				
		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>10.513.500</b>	<b>10.035.677</b>				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	240.000	172.980				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	240.000	172.980				
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	10.033.500	9.689.717				
<b>3</b>		<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>438.992.000</b>	<b>25.685.002</b>				
		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>26.740.000</b>	<b>25.685.002</b>				
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.740.000	14.205.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12.000.000	11.480.002	
		<b>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</b>	<b>412.252.000</b>	-				

		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	412.252.000	-				
4	<b>Terciptanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat</b>	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>16.875.000</b>	<b>11.564.884</b>				
		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.814.997</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>11.875.000</b>	<b>6.749.887</b>	
		Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5.000.000	4.814.997	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.000.000	875.000	
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5.875.000	5.874.887	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna namun masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan.

#### **4.1 Kesimpulan**

Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

Capaian kinerja program kecamatan takkalalla pada tahun 2025 terealisasi sebesar 91,62% dengan nilai total realisasi anggaran sebesar Rp. 8.052.715.378,- (delapan Milyar Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah).

Capaian kinerja keluaran pada masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran. Urusan pemerintahan dilaksanakan oleh kecamatan takkalalla melalui 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 8.789.065.164,- (delapan milyar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh lima ribu seratus enam puluh empat rupiah) yang dapat direalisasikan melalui 4 (empat) program dan 15 (lima belas) kegiatan dengan total realisasi sebesar Rp. 8.052.715.378,- (delapan Milyar Lima Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah). Hal ini tidak terlepas dari kerjasama semua aparat dalam lingkup kecamatan takkalalla, para stakeholder dan seluruh masyarakat kecamatan takkalalla.

#### **4.2 Saran**

- a. Pemerintah Kabupaten perlu segera memenuhi kebutuhan dan mempertimbangkan pegawai / aparat yang kapabel dan kompeten sesuai dengan analisa jabatan kantor Kec. Takkalalla untuk meningkatkan kinerja instansi.
- b. Perlunya penambahan alokasi anggaran atau jumlah Pagu untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kantor Kecamatan Takkalalla

- yang lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana yang dibutuhkan saat ini.
- c. Masih adanya proporsi jabatan dalam lingkup pemerintah kecamatan takkalalla yang tidak terisi sehingga mengakibatkan, kegiatan dan sub kegiatan tidak terbagi habis sampai di staf karena kurangnya personil. Hal ini juga berpengaruh pada bertumpuknya pekerjaan pada seksi yang tidak memiliki staf.
  - d. Perlunya koordinasi yang intensif antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa/kelurahan dalam mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah berkaitan dengan dokumen-dokumen administrasi untuk masyarakat.

#### **LAMPIRAN :**

##### ➤ Capaian Penting Lainnya

- Capaian kinerja atas tugas tambahan
  - Dalam tahun 2025 kecamatan takkalalla tidak terdapat tugas tambahan dari kabupaten
- Capaian kinerja atas penyelesaian permasalahan/sengketa
  - Dalam proses penyelesaian permasalahan/sengketa Kasi Trantib dalam menjalankan tugas dan fungsinya melaksanakan beberapa hal seperti :
    - a. Menerima laporan/aduan dari masyarakat
    - b. Meneliti laporan/aduan masyarakat
    - c. Melaksanakan mediasi
    - d. Melaksanakan peninjauan lokasi
    - e. Membuat berita acara hasil kesepakatan
- Jumlah kebijakan
  - Dalam tahun 2025 jumlah kebijakan/keputusan bupati dipakai untuk kebutuha eksternal perangkat daerah kecamatan takkalalla yaitu :
    - SK Bupati Nomor 167.1 tahun 2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja
- Penghargaan
- Bukti dukung
  - Dokumen pendukung setiap capaian kinerja kepala perangkat daerah